



KR-Antara/Hendra Nurdiansyah

PEKAN DOA SEDUNIA: Pemuka umat Kristen memasuki altar jelang ibadah pekan doa sedunia di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Yogyakarta, Kotabaru, Yogyakarta, Selasa (24/1/2023). Ibadah pekan doa sedunia yang diikuti perwakilan gereja Kristen seluruh DIY tersebut mengusung tema 'Belajarlah Berbuat Baik dan Usahakanlah Keadilan'.

SOAL REVISI UU DESA

Jokowi Persilakan Kades ke DPR

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo menegaskan, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa saat ini sudah jelas diatur bahwa masa jabatan kepala desa dibatasi enam tahun selama tiga periode. Sehingga kalau kades menginginkan perubahan soal masa jabatan, dipersilakan menyampaikan aspirasi kepada DPR RI.

"Yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi, itu silakan disampaikan kepada DPR. Yang jelas, undang-undang yang sangat jelas, membatasi enam tahun tiga periode. Prosesnya nanti ada di DPR," kata Jokowi di sela-sela kegiatannya meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Jakarta Timur, Selasa (24/1).

Saat ditanya masukan mengenai masa jabatan kepala

desa, Jokowi kembali menegaskan bahwa saat ini dalam UU Desa masa jabatan masih dibatasi enam tahun dan tiga periode.

Sementara Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia berharap isu perpanjangan masa jabatan kades tidak dikaitkan dengan kepentingan politik jelang Pemilu 2024.

"Ini yang harus kita hindari, itu yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai isu pe-

rubahan masa jabatan terkait dengan soal kepentingan menjelang Pemilu 2024," tandasnya di Jakarta.

Doli menepis wacana perpanjangan masa jabatan kades lewat revisi UU Desa itu dapat menjadi pintu masuk dari perpanjangan masa jabatan presiden karena payung hukum yang mengatur keduanya berbeda. "Kalau jabatan presiden, kita bicara soal amandemen UUD 1945. Jadi, saya kira enggak ada kaitannya, jauhlah," imbuhnya.

Komisi II juga akan mengkaji secara keseluruhan aspek merevisi UU Desa dengan menggunakan perspektif yang ditunjukkan bagi kemajuan desa. Ihwal perpanjangan

an masa jabatan kades hanya salah satu di antaranya, yang akan dilakukan pula kajian terkait efektivitasnya.

"Karena gini, apa pun pasal yang ada di satu undang-undang saling keterkaitan, misal (masa jabatan kades) sembilang tahun kami ubah, pasti akan ada dampaknya," ujar Doli.

Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan Presiden Jokowi menyetujui usulan perubahan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam UU Desa. Usulan perpanjangan masa jabatan kades itu untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu pembangunan desa.

JOKOWI KAGET

Kaesang Lirik Terjun ke Politik

SURAKARTA (KR) - Kaesang Pangarep, sang putra bungsu Presiden Jokowi ternyata sang putra bungsu Presiden Jokowi ternyata berkeinginan terjun ke politik. Keinginan itu disampaikan sendiri oleh Kaesang kepada Jokowi dan putra pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Gibran mengungkapkan keinginan sang adik, Kaesang Pangarep untuk terjun ke dunia politik di Surakarta, Selasa (24/1). Keinginan itu disampaikan Kaesang sendiri di depan dirinya dan ayahnya, Jokowi saat pulang ke Surakarta. "Yang kami bicarakan di meja makan itu Kaesang. Saya juga kaget, dia secara terbuka menyampaikan ke kami ada ketertarikan di politik," katanya.

Meski demikian, Gibran belum tahu apakah Kaesang akan mulai terjun pada Pemilihan Daerah (Pilkada) Serentak 2024. "Nggak tahu, saya baru dengar kemarin. Bapak juga kaget. Biasanya nggak pernah membicarakan itu, ini penajakan dulu," ujarnya.

Gibran mengatakan ketertarikan Kaesang tersebut karena ingin berkontribusi pada daerah. Apalagi, sejak beberapa tahun terakhir, putra bungsu Jokowi itu juga sudah terjun

langsung mengurus Klub Sepak Bola Persis Surakarta. "Kalau saya lihat, misalnya Persis, itu kan yang kerja keras Kaesang. KLB (Kongres Luar Biasa) PSSI kan Kaesang juga intens di situ. Kalau saya lihat, mampu, anak muda, tapi belajarnya cepat," pujiannya.

Gibran juga berkesempatan mengajak Kaesang dan Jokowi ke beberapa proyek infrastruktur yang sedang dalam proses pengerjaan di Kota Surakarta. "Kemarin kan kami ajak juga ke Solo Safari, Technopark, Ngarsopuro. Yo, melihat pembangunan-pembangunan di Solo. Pokoke ada ketertarikan untuk membangun, ikut membantu, lebih ke kontribusi," kata Gibran.

Sementara itu, terkait partai politik yang ingin diikuti oleh Kaesang, Gibran mengaku belum mengetahuinya. "Nanti biar Kaesang saja yang memutuskan," kilahnya.

Disinggung mengenai isu dinasti politik yang mungkin akan mencuat, Gibran mengatakan bahwa kontestasi dalam politik merupakan kompetisi. "Bisa menang, bisa kalah. Kaesang kemarin hanya melontarkan keinginan, kalau keseriusan tanya Kaesang sendiri," pungkasnya. (Ant/Has)-f

STRATEGI KENDALI COVID-19

Cegah Penyakit Tidak Menular

JAKARTA (KR) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya mencegah berkembangnya penyakit tidak menular dengan strategi pengendalian Covid-19. Kemenkes mengadopsi strategi pengendalian Covid-19 dalam upaya mencegah laju kasus sejumlah penyakit tidak menular yang kini mendominasi di kalangan pasien.

"Strategi pencegahan penyakit tidak menular sama seperti Covid-19, promosi, surveilans, terapi tetap akan kami lakukan," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (24/1).

Menkes mengungkapkan, jumlah pasien yang dirawat saat ini mulai bergeser pada penyakit tidak menular, seiring transisi pandemi menuju endemi Covid-19 di Indonesia. Strategi yang diterapkan dengan cara menguatkan peran promosi kesehatan di tingkat layanan primer, seperti Puskesmas.

Kegiatan tersebut dilakukan beriringan dengan skrining kesehatan menggunakan alat berteknologi terbaru yang lebih agresif pada 14 penyakit, di antaranya stroke, diabetes, hipertensi, kanker, jantung, TBC, dan lainnya. "Program 14 skrining di Puskesmas dan Posyandu sudah kami jalankan. Beberapa teknologi baru seperti kanker serviks, dulu pakai pap smear atau IVA test, sekarang kami coba pakai HPV DNA yang jauh lebih baik memanfaatkan laboratorium yang ada di Indonesia," katanya.

Budi mengatakan, skrining HPV DNA dalam rangka mendeteksi dini penyakit kanker rahim, merupakan salah satu teknologi terbaru yang sedang diperluas pemanfaatannya secara nasional pada tahun ini.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Tjandra Yoga Aditama mengemukakan, angka kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) di dunia, lebih banyak dari penyakit menular. (Ati)-f

BUTUH KETERLIBATAN SEMUA PIHAK

Pemberantasan Korupsi Harus Berkesinambungan

YOGYA (KR) - Korupsi menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pemberantasan korupsi bisa dilakukan sesuai kebutuhan, target, dan yang utama harus dilakukan secara berkesinambungan. Karena dalam pemberantasan korupsi salah satu strateginya bersifat preventif jangka panjang.

"Pemberantasan korupsi harus berkesinambungan dengan strategi preventif jangka panjang, di antaranya melalui edukasi. Bisa dengan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi," kata Wakil Gubernur DIY Paku Alam X dalam Koordinasi dan Monitoring Program Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah DIY terkait Perencanaan dan Penganggaran APBD dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), di Gedung Unit IX Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (24/1).

Wagub DIY mengatakan, aspek preventif-edukatif menjadi penting, terutama di area birokrasi. Apalagi sudah menjadi rahasia umum, birokrasi dan korupsi merupakan dua serangkai

yang sangat sulit untuk diurai. "Sejak awal dicetuskannya Reformasi Birokrasi pada tahun 2010, hingga detik ini birokrasi Indonesia masih saja dinodai oleh praktik-praktik korupsi," kata Paku Alam X.

Paku Alam X menegaskan, praktik korupsi di Indonesia bahkan telah merambah seluruh tingkatan. Mulai tingkat terendah hingga tertinggi. Mulai dari yang disadari, disengaja, dan terlihat jelas, hingga yang tidak disadari, tidak disengaja, dan terselubung, yang berakar dari kebiasaan. "Korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi. Karena itu, melalui pertemuan ini saya berharap KPK RI dapat memberikan arahan secara komprehensif terkait pencegahan korupsi terkait Perencanaan dan Penganggaran APBD dan PBJ di DIY," tuturnya.

Staf Satgas Korsupgah Wilayah III Uding Juharudin mengatakan, kegiatan koordinasi dan monitoring menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi tentu bertujuan agar pemerintahan yang mampu menjahterakan masyarakat bisa tercapai.

"Mumpung masih awal tahun, kita langsung melakukan koordinasi supaya nanti sepanjang perjalanan 12

bulan ke depan, biar nanti kita bisa benar-benar mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bisa lebih efektif, lebih optimal lagi," ungkapnya.

Uding menambahkan, koordinasi pemberantasan korupsi menasar elemen perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah di daerah. Alasannya, justru pada masa bagian perencanaan dan penganggaran harus dikawal agar tidak terjadi tindak pelanggaran.

"Kalau dari awal sudah kita kawal dengan benar, kita perhatikan betul, mudah-mudahan kesalahan bisa kita tekan. Memang kelihatannya perencanaan hanya berbicara angka-angka, tapi justru di sinilah yang sangat menentukan. Karena kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK selama ini, yang di tahap perencanaan, justru tidak sedikit," paparnya.

Uding berharap upaya pemberantasan korupsi dapat didukung semua pihak. Karena upaya untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi tidak bisa terwujud jika hanya bergantung pada KPK. "Pemberantasan korupsi tugas kita semua. Untuk itu mari bersama melakukan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," imbuhnya. (Ria)-f

Penghitungan Kemiskinan Perlu Objektif

BPBD BATANG: Aktivitas Gunung Dieng Masih Normal

BATANG (KR) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang, Jawa Tengah menginformasikan, aktivitas Gunung Dieng yang berada di perbatasan Kabupaten Banjarnegara, Batang, dan Wonosobo saat ini masih terpantau dalam kondisi normal.

"Aktivitas Gunung Dieng masih terpantau normal. Namun demikian, kami minta warga yang berada di lereng Gunung Dieng seperti Desa Pranten dan Gerlang, Kecamatan Blado tetap meningkatkan kewaspadaan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batang Ulul Azmi di Batang, Selasa (24/1).

Menurut Ulul Azmi, berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), disebutkan bahwa kondisi di sekitar Gunung Dieng cukup cerah dan mendung, angin bertiup lemah ke arah Utara dengan suhu udara 12-19 derajat Celsius.

Adapun tingkat keempaan tektonik lokal, kata Ulul, terjadi sebanyak 65 kali, amplitudo 6,7-427 mm, S-P 048-4,72 detik dengan durasi 4,44-29,5 detik. Kemudian, konsentrasi gas CO₂ di Kawah Sikendang minimal 0,13 persen vol maksimal 0,14 persen vol, dan rata-rata mencapai 0,13 persen vol. "Dengan tingkat aktivitas Gunung Dieng pada Level II (Waspada), maka masyarakat maupun wisatawan tidak mendekati kawasan sektor Barat Daya, Selatan, dan Tenggara Kawah Timbang dalam jarak 500 meter agar terhindar dari aliran gas CO₂," katanya. (Ant/San)-f

YOGYA (KR) - Penghitungan kemiskinan di DIY perlu dilakukan secara objektif dan multidimensi. Tidak hanya satu aspek saja. Jadi dalam penghitungan kemiskinan di DIY seharusnya tidak hanya berpatokan pada pengeluaran bulanan, tetapi juga pada hal lain. Untuk menentukan miskin atau tidak bukan berdasarkan berapa pengeluaran perbulan, namun yang dimakan apa dan berapa nilainya.

"Badan Pusat Statistik (BPS) tidak salah. Karena mereka sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau mau objektif dalam melihat kondisi masyarakat DIY harus multidimensi. Selama ini BPS tidak pernah menghitung pendapatan perkapita masyarakat. Mereka hanya menghitung pengeluaran perkapita," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY K Baskara Aji di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (24/1).

Menurut Baskara Aji, masyarakat DIY memiliki karakter khas yaitu gemar berinvestasi dalam bentuk aset. Karakter masyarakat seperti itu membuat ada beberapa data yang tidak masuk dalam penghitungan oleh BPS. Hal itu berdampak terhadap hasil data yang menyebut bahwa masyarakat DIY menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022. "DIY pernah membuat intervensi pada masyarakat. Tapi masyarakat miskin kita kasih Rp 1 juta. Tapi tidak ada perkembangan karena Rp 1 juta tidak dibelanjakan untuk permakaman dan nonpermakaman yang dihitung indikatornya oleh BPS. Melainkan dibelikan kambing. Dibelikan kambing itu aset. Aset tidak dihitung oleh BPS, itulah karakter masyarakat di DIY," terangnya. (Ria)-d



KR-Antara/Mohammad Ayudha

TRADISI NAZAR AYAM MANDHASIYA: Penampilan kesenian reog setempat pada Tradisi Mandhasiya di Dusun Pancot, Kalisoro, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (24/1/2023). Tradisi yang digelar setiap tujuh lapang sekali atau tiap Selasa Kliwon Wuku Mandhasiya dalam Penanggalan Jawa tersebut merupakan wujud syukur warga dusun kepada Tuhan YME atas limpahan berkah dan rezeki yang diberikan.